

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terbatasnya sumber daya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah seperti minimnya jumlah petugas kebersihan dan armada pengangkutan sampah yang tidak sebanding dengan jumlah timbulan sampah sehingga sampah masih banyak menumpuk di TPS, Sebagian besar masyarakat tidak memahami isi dan tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah serta belum adanya penerapan sanksi terhadap pelanggar pembuangan sampah sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan di luar jadwal yang telah ditentukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap 1). Pengorganisasian, masih kurang karena armada sampah yang ada tidak seimbang dengan timbulan sampah yang cukup besar. 2). Interpretasi, belum adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami tentang kebijakan pengelolaan sampah. 3). Aplikasi, bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggar pembuangan sampah belum dilaksanakan. Rekomendasi untuk penelitian ini adalah para implementor/ pembuat kebijakan sebaiknya melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 tahun 2015 mulai dari perencanaan, sosialisasi, pembagian tugas atau koordinasi hingga pelaksanaan agar dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah menjadi optimal.

Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan, Peraturan Daerah, Sampah

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the process of implementing the waste management policy in Pemangkat Sub-District of Sambas Regency. The problem in this study is the limited resources to support the implementation of the waste management policy such as the minimum number of street cleaners and waste transportation fleets that are not proportional to the generated amount of waste so that a lot of waste still accumulates at the TPS (Temporary Garbage Disposal). Most people do not understand the contents and objectives of the waste management policy, and the absence of punishment against waste disposal violators so that there are many people who dump garbage anywhere and outside the prearranged schedule. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The results of this research show that in the stage of 1). Organizing is still inefficient because the existing waste fleet cannot cover a large amount of generated waste. 2). Interpretation, there is no direct socialization to the community so that people do not understand about the waste management policy 3). Application, that the application of punishment against waste disposal violators has not been implemented. Recommendations from this research are among others: the implementors/policy makers should carry out waste management in accordance with the Sambas Regency Regional Regulation Number 2 of 2015 which includes planning, socialization, division of responsibilities or coordination, and implementation so that the implementation of the waste management policy will be optimal.

Keywords: Implementation, Management, Regional Regulation, Waste.



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Judul skripsi ini dipilih karena melihat permasalahan yang ada yaitu terbatasnya sumber daya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan sebagian besar masyarakat tidak memahami isi dan tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah serta belum adanya penerapan sanksi terhadap pelanggar pembuangan sampah. Fokus penelitian ini adalah pada proses implementasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh UPTD Persampahan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh UPTD Persampahan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Teori yang digunakan adalah teori Charles O. Jones (dalam widodo, 2018:90-94) yang membahas tiga tahapan dalam proses implementasi yaitu tahap pengorganisasian (*to Organized*), tahap interpretasi (*Interpretation*) dan tahap aplikasi (*Application*).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi, yaitu teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut disebabkan

pada tahap pengorganisasian, pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Sumber daya keuangan dan peralatan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah masih kurang karena armada sampah yang ada tidak seimbang dengan timbulan sampah yang cukup besar. Penetapan jadwal kegiatan kebijakan pengelolaan sampah sudah ditetapkan yaitu jam 04.00 sore sampai dengan 06.00 pagi, tetapi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah mengakibatkan sebagian besar masyarakat yang membuang sampah di luar jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan pada tahap interpretasi, pemahaman masyarakat dari isi dan tujuan kebijakan pengelolaan sampah masih rendah. Kemudian sosialisasi belum dilakukan secara langsung kepada masyarakat sehingga berakibat pada kurang pahamiannya sasaran kebijakan dari tujuan kebijakan tersebut. Yang terakhir yaitu tahap aplikasi, dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas terkait dengan penerapan sanksi masih belum diterapkan.

Rekomendasi untuk penelitian ini adalah para implementor/ pembuat kebijakan sebaiknya melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 tahun 2015 mulai dari perencanaan, sosialisasi, pembagian tugas atau koordinasi hingga pelaksanaan agar dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah menjadi optimal.